

Makna Kekuasaan dalam Politik Islam di Indonesia

Nisa Bidayatul Hidayah^{a,1*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ nisabidaytl@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel :

Received: 15 Agustus 2024;

Revised: 22 Agustus 2024;

Accepted: 10 September 2024.

Kata-kata kunci:

Islam;

Syariat;

Kekuasaan;

Politik.

ABSTRAK

Islam adalah agama universal, agama yang mengemban misi rahmatan lil alamin dan membawa konsep kepada umat manusia tentang isu-isu terkait. Politik Islam adalah wajah Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai, akhlak dan ajaran Islam, hingga keutuhan spritual umat Islam. Pembuatan artikel Makna Kekuasaan dalam Politik Islam ini menggunakan metode kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, kuesioner dengan menggunakan gform, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan yang dilakukan secara online. Kedua, dengan menggunakan studi literatur dan kajian dari beberapa jurnal yang ada. Sebagai negara yang mayoritas muslim tentunya perpolitikan di Indonesia diwarnai dengan syariat-syariat Islam. Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik, akan tetapi Islam tetap terbuka dengan berbagai konsep politik yang muncul untuk selanjutnya bisa melengkapi konsep yang telah ada, dalam Islam kekuasaan atau kekuatan berasal dari amanah Allah SWT. kepada kita sebagai khalifah di muka bumi, karena itu sebagai titipan dari Allah SWT. harus dijalankan dengan baik sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan pada kepentingan umum untuk bisa diamankan dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga bisa menjadi amal dan pahala bagi umat Islam di hari akhir kelak.

ABSTRACT

Keywords:

Islam;

Sharia;

Power;

Politics.

The Meaning of Power in Islamic Politics in Indonesia. Islam is a universal religion, a religion that carries the mission of rahmatan lil alamin and brings concepts to mankind on related issues. Islamic politics is the face of Islam with power and the state that gives birth to political attitudes and behavior as well as political culture oriented to Islamic values, morals and teachings, to the spiritual integrity of Muslims. The making of this article on the Meaning of Power in Islamic Politics uses a qualitative method. The instruments used in this study were first, a questionnaire using a gform, there were several questions asked to informants or informants which were conducted online. Second, by using literature studies and studies from several existing journals. As a Muslim-majority country, of course, politics in Indonesia is colored by Islamic laws. Islam does have a unique concept of politics, but Islam remains open to various political concepts that appear to further complement existing concepts, in Islam power or strength comes from the mandate of Allah SWT. to us as caliphs on earth, because it is a deposit from Allah SWT. must be carried out properly in accordance with Islamic law and based on the public interest so that it can be practiced and put to good use, so that it can be a charity and reward for Muslims in the last days.

Copyright © 2024 (Nisa Bidayatul Hidayah). All Right Reserved

How to Cite : Hidayah, N. B. (2024). Makna Kekuasaan dalam Politik Islam di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(11), 369–374.
<https://doi.org/10.56393/decive.v4i11.2492>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Islam adalah agama universal yang membawa misi rahmatan lil 'alamin, yaitu membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta (Shaleh dkk, 2024). Tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, Islam juga memiliki konsep komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk politik, ekonomi, dan hukum (Aqbar dkk, 2020). Dalam ranah politik, Islam berperan sebagai sistem yang mengatur urusan rakyat dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan (Fuadi, 2016). Hal ini menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengarahkan bagaimana tata kelola negara seharusnya dilakukan berdasarkan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi (Malihah et al., 2020). Dengan demikian, politik Islam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Dalam konteks politik, Islam memandang kekuasaan sebagai sarana untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan rakyat (Salang, 2006). Politik Islam adalah wajah Islam yang diimplementasikan dalam pemerintahan dan negara, yang melahirkan perilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam (Rahman dkk, 2020). Nilai-nilai tersebut mencakup keadilan, akhlak, dan kesejahteraan umat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Ajustina & Nisa, 2024). Oleh karena itu, politik dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengelolaan kekuasaan, tetapi juga menuntut adanya penerapan nilai-nilai etika yang diajarkan oleh agama. Senada dengan pendapat Din Syamsuddin dan Azyumardi Azra, Dale Eickelman dan James Piscatori menyimpulkan bahwa citra politik Muslim saat ini terkait erat dengan upaya untuk menafsirkan makna Islam dalam berbagai kebijakan formal dan informal (Malihah et al., 2020).

Istilah kekuasaan dalam tradisi pemikiran politik Islam memainkan peranan yang sangat penting. Kekuasaan dipahami sebagai amanah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi (khalifah) (Masykur, 2017). Dalam menjalankan kekuasaan ini, manusia dituntut untuk memelihara kemaslahatan bersama dan menjaga kehidupan umat manusia sesuai dengan ajaran agama (Stevanus, 2019). Kekuasaan dalam Islam bukanlah alat untuk memanipulasi atau menindas, tetapi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek sosial, politik, dan budaya sebagai bagian dari misi suci agama untuk membangun peradaban yang adil dan sejahtera (Malihah et al., 2020). Dengan demikian, kekuasaan dalam Islam tidak terlepas dari tanggung jawab moral yang harus dijalankan oleh pemimpin.

Pemikiran bahwa kekuasaan adalah amanah ilahi ini telah menjadi dasar dari berbagai sistem pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, Islam telah mengajarkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil dan berlandaskan pada hukum yang benar. Meskipun Nabi tidak pernah secara eksplisit menyatakan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin politik setelah wafat, sahabat-sahabatnya memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Terpilihnya Abu Bakar menandai dimulainya era Khulafa al-Rasyidin, yaitu masa kepemimpinan yang sangat dihormati dalam sejarah Islam karena berusaha mengikuti prinsip-prinsip konstitusi Madinah yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan (Malihah et al., 2020).

Namun, setelah masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, situasi politik mulai berubah, terutama pada masa kekhalifahan Usman bin Affan. Usman diangkat melalui sebuah dewan pemilihan yang dikenal sebagai *Ahl al-Halli wal Aqdi*, namun pemerintahannya kerap ditandai dengan patronase dan otoritarianisme. Praktik politik ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama karena adanya persepsi bahwa kekuasaan telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Keresahan ini akhirnya berujung pada konflik politik yang semakin memperumit situasi, hingga mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Usman (Malihah et al., 2020). Kejadian ini menandai awal dari pergolakan besar dalam sejarah politik Islam.

Perselisihan politik terus berlanjut setelah kematian Usman, terutama pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali, sebagai sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, menghadapi tantangan

yang sangat berat, baik dari dalam maupun luar. Ia harus berhadapan dengan oposisi kuat, termasuk dari kalangan keluarga Bani Umayyah yang merasa kehilangan kekuasaan setelah terbunuhnya Usman. Selain itu, istri Nabi, Aisyah r.a, bersama beberapa sahabat terdekat juga menyatakan ketidaksetujuan terhadap kepemimpinan Ali. Perselisihan ini memunculkan konflik yang berujung pada perang saudara yang dikenal sebagai Perang Jamal, dan berakhir dengan kematian Ali. Setelah itu, kekuasaan Islam berpindah ke tangan Dinasti Bani Umayyah yang menandai era baru dalam sejarah politik Islam (Malihah et al., 2020).

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk menjelajahi makna kekuasaan dalam politik Islam. Penelitian kualitatif dilakukan oleh sekelompok peneliti di bidang ilmu-ilmu sosial, termasuk pendidikan, dan memperkaya hasil penelitian kuantitatif dengan pemahaman mendalam dan penemuan yang kompleks. Penelitian dilaksanakan di Cicalengka, Kabupaten Bandung pada tanggal 13 Juni 2022, dengan fokus pada warga Cicalengka sebagai informan atau partisipan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan termasuk kuesioner melalui gform secara online dan studi literatur dari berbagai jurnal terkait. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis reduksi data untuk menghasilkan temuan dan hipotesis yang dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca, mendukung pemahaman mendalam tentang topik penelitian ini.

Hasil dan pembahasan

Seiring dengan pernyataan tentang *The Renaissance of Islam*, muncul berbagai pertanyaan tentang sifat, karakter dan ruang lingkup negara Islam dan sistem politik Islam yang menjadi topik perhatian khusus. Namun, studi politik Islam lebih banyak membahas peristiwa politik terkini di dunia Muslim kontemporer, tanpa ada upaya untuk melihat lebih dalam aspek teori politik yang benar-benar mempengaruhi peristiwa tersebut.

Di dalam kaedah negara di telah ditetapkan apa saja yang menjadi hak serta kewajiban masyarakat di dalam keseharian hidupnya yaitu menetapkan cara bertingkah laku sebagai manusia dalam hidup bermasyarakat serta keharusan untuk menaati aturan yang ada. Jika ketaatan pada negara ini hanya diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas manusia, maka tujuan negara itu akan sulit dicapai. Karena untuk memengaruhi keinginan bebas itu berarti memaksa masyarakat untuk taat kepada negara. Pemaksaan ketaatan akan negara ini membawa kita kepada masalah kekuasaan, dalam arti kemampuan untuk menegakkan daya paksaannya.

Menurut beberapa responden kuesioner makna dari kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan tingkah laku orang baik secara langsung maupun tidak langsung, kemampuan yang diberikan agar bisa menguasai sebuah kelompok tertentu, kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu hal, kekuasaan adalah ketika anda memiliki kekuatan lebih dalam memerintah, mengendalikan dan sebagainya, kekuasaan adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengendalikan orang lainnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan orang lain, yang bisa didapat dari pemberian atau sudah dimiliki sejak lahir. Dalam hal ini negara memiliki kemampuan atau kekuatan untuk mengatur wewenang dari setiap lembaga yang ada.

Politik dalam bahasa Arab berarti siyasah berasal dari kata *سياس-سياسة* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dapat diambil kesimpulan bahwa politik dalam islam berarti menuntun dan membimbing menuju kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Sebagai negara yang mayoritas muslim tentunya perpolitikan di Indonesia diwarnai dengan syariat-syariat Islam. Ada dua hal yang bersifat kontradiktif dalam hal hubungan politik antara Islam

dan negara di negara-negara Muslim atau negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti halnya Indonesia. Kedua hal tersebut yakni; *Pertama*, posisi Islam yang menonjol diberbagai aspek hal ini dikarenakan kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk negara setempat. *Kedua*, meskipun dominan Islam hanya berperan minor dalam wilayah kehidupan politik negara bersangkutan. Sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia, Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam politik Indonesia.

Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik, akan tetapi Islam tetap terbuka dengan berbagai konsep politik yang muncul untuk selanjutnya bisa melengkapi konsep yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam dan syariat yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya dengan amat terperinci. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak tersendiri dalam urusan politik. Akan tetapi, politik bukanlah menjadi satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa adanya corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial.

Di kalangan intelektual Islam mengemukakan beberapa teori mengenai kekuasaan, di antaranya teori ketuhanan, teori kekuatan, dan teori kontrak sosial. Pada teori ketuhanan, mengatakan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan, penguasa bertahta atas kehendak Tuhan sebagai pemberi kekuasaan kepadanya. Salah satu responden setuju dengan teori ini, menurutnya Kekuasaan adalah kewenangan untuk menguasai sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT. oleh karena itu, kekuasaan hanya boleh dimanfaatkan untuk kebaikan.

Sementara teori kekuatan mengatakan bahwa, kekuasaan politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan antara kelompok. Negara dibentuk oleh yang pemenang, dan kekuatanlah yang membentuk kekuasaan dan pembuat hukum. Dengan begitu munculah hirarki dimana yang kuat memiliki kekuasaan terhadap yang lemah.

Teori tersebut, juga dikemukakan Ibnu Khaldun. Menurut khaldun, manusia sebagai masyarakat memerlukan *al-wazi'* (pemimpin) untuk menjalankan kekuasaan dan memperbaiki kehidupan masyarakat juga mencegah terjadinya perbuatan aniyah di antara sesama.

Sedangkan Ibnu Abi Rabi' lebih berorientasi pada teori ketuhanan. Hal ini berlandaskan pada pandangannya bahwa Allah mengangkat para penguasa bagi masyarakat. Penguasa-penguasa itu diberikan pancaran Ilahi kemudian ditetapkan mereka dengan kemurahannya.

Sementara Al-Gazali mengemukakan pandangannya dengan berlandaskan pada ayat 59 surat al-Nisa yang memerintahkan orang-orang mukmin taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan kepada para pemimpin, dan ayat 26 surat Ali Imran yang menjelaskan bahwa Allah memberikan kekuatan (kekuasaan) kepada orang yang ia kehendaki. Oleh karena itu Al-Gazali mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepala negara atau sultan adalah "bayang-bayang Allah di muka bumi". Dan karena itu rakyat wajib mengikuti dan mentaatinya, tidak boleh menentanginya.

Meskipun Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan mutlak, namun menghendaki manusia agar mampu berperan menjadi wakil (khalifah) di muka bumi. Karena itu manusia dapat mengatakan dirinya mempunyai kekuasaan tak terbatas sepanjang digunakan hanya demi memenuhi kehendak-Nya.

Beberapa responden juga memiliki pandangan serupa, Dalam islam kekuasaan merupakan sebuah amanah yang didapat untuk memimpin dalam mencapai sesuatu, kekuasaan dalam islam merupakan sebuah bagian dari perintah syariat yang sangat penting dan menjadi potensi ladang amal kebaikan yang berbuah pahala, dalam islam kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi karena sesungguhnya kekuasaan itu adalah amanah. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam kekuasaan atau kekuatan berasal dari amanah Allah SWT. kepada kita sebagai khalifah di muka bumi, karena itu sebagai titipan dari Allah SWT. harus dijalankan dengan baik

sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan pada kepentingan umum untuk bisa diamalkan dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga bisa menjadi amal dan pahala bagi umat Islam di hari akhir kelak.

Telah dijelaskan bahwa politik Islam merupakan aktivitas politik yang dijalankan berdasar kepada syariat Islam. Islam memiliki coraknya sendiri dalam dunia politik di Indonesia, meski Islam tetap berperan marginal dalam dunia perpolitikan. Dalam kekuasaan ada konsep yang memerintah dan yang diperintah. Sebaiknya antara yang memerintah dan yang diperintah perlu adanya kerjasama, dan saling menghargai haknya masing-masing. Kemudian yang berkuasa perlu mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam politik islam, kekuasaan adalah sebuah amanah politik yang harus dijalankan, karena baik buruknya masyarakat dipengaruhi oleh penguasa. Dalam islam konsep kekuasaan politik merupakan sebuah bagian dari perintah dan merupakan bagian dari syariat yang sangat penting dan berpedoman terhadap alquran sebagai sumber utama.

Sebagai negara mayoritas Islam yang corak politiknya terdapat beberapa didasarkan pada syariat Islam, memiliki beberapa korelasi antara makna kekuasaan dalam politik Indonesia dengan politik Islam, menurut responden adalah beberapa korelasi diantaranya syarat ketika seseorang menjadi penguasa di Indonesia dan dalam syariat islam terdapat beberapa kesamaan, seperti mengutamakan kepentingan rakyat dibanding penguasa, memilih penguasa berdasarkan suara rakyat, penguasa dengan ilmu yang mumpuni, dan syarat lainnya, dalam Islam selalu diajarkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab dalam kekuasaan dan tidak boleh disalahgunakan, maka di Indonesia hal ini perlu diterapkan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi khususnya, contohnya yakni negara kita merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia dan mayoritas penduduk dari Indonesia beragama Islam. Indonesia juga dipandang sebagai negara hukum sehingga tak heran bila dunia perpolitikan di Indonesia tergolong aktif (Anggraeni et al., 2022). Sehingga perpolitikan di indonesia pasti ada hubungannya dan ada korelasinya dengan konsep politik islam.

Dapat diambil kesimpulan bahwa meski Islam bersifat minor dalam perpolitikan di Indonesia namun corak kekuasaan di Indonesia dan dalam Politik Islam memiliki kesamaan, yaitu memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan rakyat banyak. Perpolitikan di Indonesia sebagai negara mayoritas Islam tidak dapat dipisahkan dari syariat Islam, dan Islam sebagai agama yang universal terbuka dengan berbagai macam perubahan dan kemajuan jaman, karena itu perpolitikan yang ada di Indonesia memanfaatkan syariat Islam yang dianggap universal dan baik untuk dijalankan.

Simpulan

Islam adalah agama universal, agama yang mengemban misi rahmatan lil alamin dan membawa konsep kepada umat manusia tentang isu-isu terkait. Politik Islam adalah wajah Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai, akhlak dan ajaran Islam, hingga keutuhan spritual umat Islam. Dikalangan intelektual Islam mengemukakan beberapa teori mengenai kekuasaan, diantaranya teori ketuhanan, teori kekuatan, dan teori kontrak sosial. Dalam Islam kekuasaan atau kekuatan berasal dari amanah Allah SWT. harus dijalankan dengan baik sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan pada kepentingan umum untuk bisa diamalkan dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga bisa menjadi amal dan pahala bagi umat Islam di hari akhir kelak.

Referensi

- Ahmad Ilyas Hidayat. (2012). *Kekuasaan Perspektif Politik Islam*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar.
- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 626-637.
- Anggraeni, L., Anggraeni, L., Affandi, I., Wahyudin, D., Paramitha, S. T., & Gilang, M. (2022). *Optimization of the Board Game as a Platform for the Concept of Peace Education : A Survey*

- Method Study To cite this article : method study . International Journal of Education in Mathematics , Science , and Technology Optimization of the Board Game as a .*
- Aqbar, K., Iskandar, A., & Yunta, A. H. D. (2020). Konsep al-falah dalam islam dan implementasinya dalam ekonomi. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(3), 516-531.
- Fuadi, A. (2016). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(1), 13-32.
- Ibnu Manzbur. (1968). *Lisan al-Arab, Vol. VI*. Beirut: Dar al-çadr.
- Louis Ma'louf. (1986) *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Masykur, A. L. (2017). *Manusia Menurut Seyyed Hossein Nasr* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017).
- Rahman, A., Nurlela, N., & Rahmawan, A. D. (2020). Relasi Islam Kultural dan Politik Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 15(1), 69-81.
- Ridwan. (2017). Hubungan Islam dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al- Banna. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*. 12 (2). Hlm. 223-2236.
- Salang, S. (2006). Parlemen: Antara kepentingan politik vs aspirasi rakyat. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 90-120.
- Shaleh, A. Q., Aisyah, F., & Nisa, K. (2024). Islam Rahmatan Lil Alamin Di Media Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Analisis Framing Robert M. Entman. *Tembayat*, 2(1), 65-88.
- Stevanus, K. (2019). Pelestarian alam sebagai perwujudan mandat pembangunan: suatu kajian etis-teologis. *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)*, 5(2), 94-108.
- Usman Jafar. (2017). Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam). *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*. 6 (2). Hlm. 345-357